



Penguatan Aparatur Kampung di Wilayah Pulau Terluar: Tantangan dan Solusi Inovatif di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya

Melyana Ratana Pugu

Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Email: puguratana@yahoo.com

ABSTRAK

Tata Kelola kampung yang baik dimulai dengan pemenuhan aparat kampung yang berkualitas dan inovatif sehingga berbagai program dan implementasinya dalam pelaksanaan pembangunan terutama di pulau-pulau terluar dapat terlaksana dengan baik. Kampung Rutum sebagai salah satu kampung di pulau terluar yang merupakan bagian Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu contoh betapa aparat kampung harus menghadapi medan berat yang jauh ditengah samudera untuk melakukan pembangunan. Tujuan penulisan ini adalah mendapatkan gambaran keadaan aparat kampung di pulau terluar, tantangan yang dihadapi dan peluang serta solusi inovatif untuk membangun pulau terluar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data secara primer yaitu langsung mengamati keadaan kampung Rutum dan juga data sekunder melalui buku, jurnal dan media. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan mendapatkan Analisa yang menjadi luaran tulisan ini yaitu bahwa pengelolaan kampung yang baik membutuhkan Kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sehingga aparat kampung dapat dikuatkan untuk menjalankan pemerintahan yang jauh dari rentang kendali. tata kelola administrasi pemerintahan kampung menjadi lebih tertata dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang terstandar, peningkatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) para perangkat kampung untuk menata administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi desa baik secara manual maupun digital dapat terlaksana dengan skill yang tercukupi oleh aparat kampung.

Kata kunci: Penguatan, Aparatur, Tantangan dan Solusi, Kampung Rutum, Papua Barat Daya.

ABSTRACT

Good village governance begins with the fulfillment of quality and innovative village officials so that various programs and their implementation in the implementation of development, especially on the outer islands, can be carried out properly. Rutum Village as one of the villages on the outermost island which is part of the Ayau Islands District, Raja Ampat Regency, Southwest Papua Province is an example of how village officials have to face difficult terrain far in the middle of the ocean to carry out development. The purpose of this writing is to get an overview of the state of village officials on the outer islands, the challenges faced, and opportunities and innovative solutions to build the outer islands. The method used is a qualitative method with primary data collection, namely directly observing the state of Rutum village and also secondary data through books, journals, and media. The data collected is then processed and an analysis is the output of this paper, namely that good village management

requires the cooperation of the central, provincial, and district governments so that village apparatus can be strengthened to run a government that is far from the range of control. Village government administration governance becomes better organized and correct by standardized guidelines, increasing the competence (knowledge and skills) of village officials to organize government administration and village administration services both manually and digitally can be carried out with sufficient skills by village officials.

Keywords: *Strengthening, Apparatus, Challenges and Solutions, Kampung Rutum, Southwest Papua, Raja Ampat.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ribuan pulau, dengan beberapa di antaranya termasuk dalam kategori pulau-pulau terluar. Pulau-pulau terluar ini tidak hanya memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam yang besar (Liwang, 2023). Namun, kondisi geografis yang terpencil dan terbatasnya aksesibilitas sering kali menempatkan pulau-pulau ini dalam kondisi keterbelakangan, termasuk dalam aspek pemerintahan desa atau kampung. Aparatur kampung, yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di pulau-pulau terluar, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka (Hertati et al., 2022).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi aparatur kampung di pulau-pulau terluar adalah minimnya akses terhadap pelayanan publik. Infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan sering kali tidak memadai (Salahudin, 2016). Kondisi ini memperburuk kemampuan aparatur kampung dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan administratif dasar, seperti pencatatan kependudukan, sering kali terhambat oleh ketiadaan fasilitas dan teknologi pendukung. Selain itu, masyarakat di pulau-pulau terluar sering harus menempuh perjalanan jauh dan biaya tinggi untuk mengakses layanan publik yang biasanya hanya tersedia di pusat-pusat kecamatan atau kabupaten (Sugiharti et al., 2023).

Aparatur kampung di pulau-pulau terluar sering kali memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Sebagian besar aparatur hanya memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, sehingga kurang memahami regulasi, tata kelola pemerintahan, dan prosedur administrasi yang efektif. Minimnya pengetahuan ini berdampak pada kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan membuat aparatur kampung kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan baru dari pemerintah pusat (GUSMAN, 2024).

Kelemahan lain yang menjadi sorotan adalah kemampuan aparatur kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Banyak aparatur yang tidak memiliki keahlian teknis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau dokumen perencanaan lainnya. Akibatnya, program pembangunan yang dijalankan sering kali tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Rizal et al., 2022). Ketergantungan pada pihak eksternal, seperti pendamping desa atau konsultan, menunjukkan rendahnya kemandirian aparatur

kampung dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Faktor geografis juga menjadi salah satu kendala utama dalam penguatan aparatur kampung di pulau-pulau terluar. Pulau-pulau ini sering kali terpencil dan hanya dapat diakses melalui transportasi laut yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan distribusi barang dan jasa, tetapi juga menghambat koordinasi antara aparatur kampung dengan pemerintah daerah atau pusat. Dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kebutuhan mendesak lainnya, keterisolasian geografis ini semakin memperburuk situasi (Putri & Utama, 2024).

Selain kelemahan pada aparatur kampung, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi tantangan. Masyarakat di pulau-pulau terluar sering kali memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minim pemahaman tentang peran mereka dalam pembangunan. Akibatnya, inisiatif dari masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat terbatas. Hal ini semakin memperberat tugas aparatur kampung dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif dan partisipatif (Birahayu, 2019).

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pembangunan di wilayah terluar, seperti Dana Desa dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Aparatur kampung sering kali kesulitan dalam mengelola dana yang diterima karena keterbatasan pengetahuan dan sistem pengawasan yang lemah. Selain itu, dukungan dari pihak eksternal sering kali bersifat sementara dan tidak memberikan dampak jangka panjang pada penguatan kapasitas aparatur kampung (Ginting, 2016).

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat aparatur kampung di pulau-pulau terluar (Malik et al., 2019). Penguatan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah-wilayah strategis tersebut. Dengan memperkuat aparatur kampung, diharapkan masyarakat di pulau-pulau terluar dapat merasakan dampak positif dari pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi (Sagala et al., 2025).

Kondisi aparatur kampung di pulau-pulau terluar Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Keterbatasan dalam pelayanan publik, pengetahuan, dan perencanaan pembangunan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui penelitian yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif dan aplikatif untuk memberdayakan aparatur kampung dan mendukung pembangunan di pulau-pulau terluar sebagai bagian integral dari pembangunan nasional khususnya dalam penelitian ini mengkaji penguatan aparatur kampung di Pulau terluar yang ada di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Kesehatan masyarakat merupakan dimensi lain dari keamanan manusia yang sangat relevan. Aparatur kampung dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur kampung dalam merespons kebutuhan kesehatan, termasuk pengelolaan bencana dan pandemi, merupakan langkah penting dalam pendekatan keamanan manusia.

Pulau-pulau terluar sering menghadapi ancaman lingkungan seperti erosi pantai, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Aparatur kampung dapat diberdayakan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan

keamanan manusia membantu menciptakan kerangka kerja yang holistik dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penggalan data dari berbagai perspektif subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penguatan aparatur kampung dalam konteks pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan di wilayah terpencil. Sumber Data adalah melalui Data Primer: Wawancara mendalam dengan aparatur kampung (kepala kampung, sekretaris kampung, dan perangkat lainnya). Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan masyarakat setempat. Data Sekunder: Dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), laporan tahunan kampung, dan kebijakan terkait. Literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Cara Pengumpulan Data Wawancara Mendalam: Menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, tantangan, dan pandangan aparatur kampung mengenai penguatan kapasitas mereka. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung aktivitas aparatur kampung dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait untuk memahami kerangka kerja dan kebijakan penguatan aparatur kampung. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Menggunakan FGD untuk mendapatkan perspektif kolektif dari masyarakat dan tokoh lokal tentang peran aparatur kampung. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Reduksi Data: Proses penyederhanaan data mentah dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Miles dan Huberman, 1994). Penyajian Data: Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan diagram alur untuk mempermudah interpretasi. Penarikan Kesimpulan: Data yang telah diolah dianalisis menggunakan metode triangulasi (Patton, 1990) untuk memverifikasi validitas dan reliabilitas temuan. Analisis Tematik: Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang relevan dengan penguatan aparatur kampung. Metode Kualitatif yang Digunakan ; Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967): Digunakan untuk membangun teori dari data lapangan terkait penguatan aparatur kampung. Fenomenologi (Husserl, 1931): Membantu memahami pengalaman langsung aparatur kampung dalam menjalankan tugas mereka. Etnografi (Spradley, 1979): Digunakan untuk memahami budaya kerja dan dinamika sosial aparatur kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Rutum yang terletak di Distrik Kepulauan Ayau, Papua Barat Daya, merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia dengan potensi strategis dalam menjaga kedaulatan nasional. Namun, sebagai kampung di wilayah terpencil, Rutum menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi. Aparatur kampung memegang peranan sentral dalam menjawab tantangan ini, tetapi kapasitas mereka sering kali terbatas akibat berbagai faktor, termasuk kendala geografis, minimnya akses terhadap pelatihan, dan

keterbatasan sumber daya. Artikel ini menganalisis tantangan utama yang dihadapi aparaturnya kampung Rutum serta solusi yang dapat diterapkan untuk menguatkan kapasitas mereka.

Tantangan dalam Penguatan Aparatur Kampung

Keterisolasian Geografis ; Kampung Rutum terletak di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Keterbatasan transportasi laut dan udara membuat akses ke pusat pemerintahan dan layanan publik menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menghambat koordinasi antara aparaturnya kampung dengan pemerintah daerah, serta menyulitkan distribusi sumber daya dan bantuan. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia; Aparatur kampung Rutum umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minim akses terhadap pelatihan atau program peningkatan kapasitas. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami regulasi, menyusun rencana pembangunan, dan mengelola dana desa secara efektif; Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi; Infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi, sangat terbatas di Kampung Rutum. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi informasi menghambat upaya modernisasi administrasi pemerintahan kampung dan penyebaran informasi kepada masyarakat.; Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tantangan lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan; Ketergantungan pada Bantuan Eksternal, Aparatur kampung Rutum sering kali bergantung pada bantuan eksternal untuk menjalankan program pembangunan. Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya kemandirian dalam pengelolaan sumber daya lokal dan perencanaan pembangunan.

Solusi untuk Penguatan Aparatur Kampung

Pengembangan Infrastruktur Dasar, Pemerintah daerah dan pusat harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di Kampung Rutum, termasuk transportasi, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat koordinasi antar-lembaga.; Pembangunan dermaga dan pengadaan kapal desa dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan transportasi;

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Menyelenggarakan program pelatihan dan workshop untuk aparaturnya kampung dalam bidang administrasi, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan dana desa. Memanfaatkan teknologi digital untuk pelatihan jarak jauh sehingga aparaturnya kampung dapat terus meningkatkan kapasitas tanpa harus meninggalkan wilayah mereka; Modernisasi Sistem Administrasi, Mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang dapat membantu aparaturnya kampung dalam mengelola data, melaporkan kegiatan, dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah; Penyediaan perangkat seperti komputer dan akses internet harus menjadi prioritas untuk mendukung modernisasi ini.

Penguatan Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan program edukasi; Memberikan insentif kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi; Pemberdayaan Ekonomi Lokal; Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata berbasis alam; Membentuk kelompok usaha bersama (KUB) yang melibatkan masyarakat dan didukung oleh aparaturnya kampung untuk meningkatkan kemandirian ekonomi; Kemitraan dengan Lembaga Eksternal; Membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor swasta untuk mendukung program-program penguatan aparaturnya kampung; Kerjasama ini dapat mencakup pelatihan, pendanaan, atau penyediaan infrastruktur

Melyana Ratana Pugu

Penguatan Aparatur Kampung di Wilayah Pulau Terluar: Tantangan dan Solusi Inovatif di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya

yang diperlukan; Peningkatan Kebijakan dan Regulasi, Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mendukung penguatan aparatur kampung, termasuk alokasi anggaran khusus untuk wilayah terluar seperti Rutum; Menyusun regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahun 2023, sebuah program pilot diimplementasikan di Kampung Rutum oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan NGO lokal. Program ini meliputi: Pembangunan Infrastruktur: Dermaga kecil dibangun untuk meningkatkan akses transportasi, Panel surya dipasang untuk menyediakan listrik bagi kantor kampung; Pelatihan Kapasitas Aparatur: Workshop intensif tentang perencanaan pembangunan diadakan untuk aparatur kampung. Pelatihan berbasis teknologi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan perangkat digital. Pemberdayaan Masyarakat: Program edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Kelompok nelayan dibentuk untuk mengelola potensi perikanan lokal secara berkelanjutan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan kinerja aparatur kampung dalam melayani masyarakat dan menyusun rencana pembangunan yang lebih baik. Namun, keberlanjutan program ini masih bergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan mitra eksternal.

Selanjutnya tahun 2024, penulis melakukan penelitian di kampung Rutum dan menemukan bahwa penguatan aparatur kampung di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau sangat penting namun aparat kampung disini dihadapkan dengan berbagai tantangan dilapangan yaitu medan yang berat karena jauh dari kota. dimana jumlah penduduk Kampung Rutum sesuai hasil penelitian 2024 adalah berjumlah 449 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 222 orang dan perempuan sebanyak 227 orang. Komposisi aparatur kampung adalah kepala kampung bernama Thomas Ap dan didampingi 3 kepala urusan yaitu urusan umum, pemerintahan dan pembangunan. Menurut kepala Kampung Rutum bahwa kampung Rutum sangat butuh program-program yang dapat meningkatkan pembangunan kampung ini. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ada dana desa yang digunakan untuk membeli viber, memberi motor tempel, merenovasi rumah warga, membangun bak penampungan air namun hingga kini belum sepenuhnya membantu pembangunan masyarakat akibat jarak yang jauh dari pusat pemerintahan maka tingkat kemahalan dan kesulitan akses menjadikan kebutuhan semakin tinggi akhirnya program-program penting tidak dapat dijalankan. Kebutuhan bahan bakar minyak sangat tinggi karena transportasi laut yang digunakan minimal satu kali perjalanan ke ibu kota Kabupaten di Waisai Raja Ampat ataupun ke Kota Sorong mencapai 10 juta pulang pergi. Tentu saja kebutuhan ini menjadikan aparat kampung sangat kesulitan menentukan program pembangunan yang tepat akibat minimnya anggaran.

Solusi yang inovatif tentu diperlukan dalam membangun pulau terluar ini seperti di Kampung Rutum. Tentu saja solusi yang pertama adalah kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pulau terluar dengan baik melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga membantu aparat kampung dalam pelaksanaannya termasuk pembiayaannya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat tersebar disewa sector baik pembangunan infrastruktur dasar dikampung, pembangunan Pendidikan baik sarana prasaran maupun pengadaan guru guru dan tenaga teknis, bidang kesehatan pu pengadaan sarana prasarana kesehatan dan para dokter dan tenaga medis, bidang sosial ekonomi yaitu pendirian pasar dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, juga pelestarian budaya.

Meskipun pendekatan keamanan manusia menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam konteks penguatan aparatur kampung menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama

Penguatan Aparatur Kampung di Wilayah Pulau Terluar: Tantangan dan Solusi Inovatif di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya

Melyana Ratana Pugu

Penguatan Aparatur Kampung di Wilayah Pulau Terluar: Tantangan dan Solusi Inovatif di Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya

adalah keterbatasan kapasitas aparatur kampung, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun sumber daya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menghambat implementasi program-program yang berorientasi pada keamanan manusia.

Namun, ada juga peluang besar untuk memanfaatkan pendekatan ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, aparatur kampung dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta dapat membantu memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakan program-program yang mendukung keamanan manusia.

SIMPULAN

Pendekatan keamanan manusia memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memperkuat peran aparatur kampung dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan mengintegrasikan dimensi-dimensi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, komunitas, dan lingkungan, aparatur kampung dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Namun, keberhasilan penerapan pendekatan ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam pendidikan, pelatihan, dan koordinasi lintas sektor. Penguatan aparatur kampung di wilayah terluar seperti Kampung Rutum memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra eksternal. Dengan langkah-langkah yang tepat, aparatur kampung dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Birahayu, D. (2019). Hambatan Hukum dalam Diplomasi Maritim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelautan. *Perspektif Hukum*, 105–123.
- Ginting, A. M. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- GUSMAN, V. I. (2024). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi Pelayanan Administrasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Keluang Paser Jaya Kabupaten Paser*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 236–248.
- Liwang, G. P. (2023). The Vicious Cycle and False Consciousness in The Fast Saga. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 12(2), 157–170.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106–175.
- Putri, A. S., & Utama, L. S. (2024). Strategi Peningkatan Kedisiplinan Aparat Desa Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 24–35.
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e-government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.
- Sagala, P., Jamil, M., Hadi, I., & Lubis, A. F. (2025). Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 242–260.
- Salahudin, S. (2016). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing (Salahuddin. *Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM)*).
- Sugiharti, D. K., Ramadhani, R. H., Sueb, M., Irawady, C., & Yuliaftri, I. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12(2), 255–261.

Melyana Ratana Pugu

Penguatan Aparatur Kampung di Wilayah Pulau Terluar: Tantangan dan Solusi Inovatif di Kampung Rutum
Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya



© 2025 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).